

## **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM YESS DALAM ERSPEKTIF PRINCIPAL AGENT DI KABUPATEN PASURUAN**

**Muhammad Rikzul Fikri<sup>1</sup>, Aminullah<sup>2</sup>**  
Universitas Yudharta Pasuruan<sup>1,2</sup>  
rikzulfikri@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas Implementasi Program Yess dalam Perspektif *Principal Agent* di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini kondisi *principal-agent* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi dari program Yess. Dimana masalah keagenan kerap terjadi seperti, *Asimmetryc Information*, *Adverse Selection*, dan *Moral Hazard*. Hasil penelitian bahwa pada implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh DIT (*District Implementation Team*) dan bertanggungjawab kepada Koordinator. Simpulan, masalah keagenan dapat diatasi dengan baik oleh Koordinator dan DIT (*District Implementation Team*) di Kabupaten Pasuruan. Sehingga implementasi program Yess dapat terlaksana dengan efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Principal Agen, Program Yess

### **ABSTRACT**

*The aim of the research is to determine the effectiveness of implementing the Yess Program from the Principal Agent's perspective in Pasuruan Regency. In this case, the principal-agent condition can be a factor that influences the implementation of the Yess program. Where agency problems often occur, such as Information Asymmetry, Adverse Selection, and Moral Hazard. The research results show that the implementation of the Yess program in Pasuruan Regency is carried out by the DIT (District Implementation Team) and is responsible to the Coordinator. In conclusion, agency problems can be handled well by the Coordinator and DIT (District Implementation Team) in Pasuruan Regency. So that the implementation of the Yess program can be carried out effectively.*

**Keywords:** *Effectiveness, Principal Agent, Yess Program*

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan global telah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah era distrupsi. Dimana sebuah sistem atau tatanan banyak mengalami perubahan, dari tatanan lama menjadi tatanan baru yang didukung oleh berkembangnya pengetahuan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan dampak yang positif maupun negatif yang menjangar keberbagai sektor termasuk sektor ekononi, sosial, politik, hingga berdampak pada sumber daya manusia (SDM) dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam memproduksi kebijakan dalam negara Indonesia perlu diselaraskan kepada potensi dan memiliki oleh negara, agar dapat menjawab tantangan era distrupsi ini. Generasi penerus bangsa yakni pemuda generasi milenial merupakan bagian dari bonus demografi Indonesia di masa depan, maka perlu diyakinkan dan diberikan motivasi untuk dapat melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi serta mengembangkan *Soft Skill* dan *Hard Skill* yang mereka miliki dengan dilibatkan atau

menjadi objek utama sebuah kebijakan pemerintah.

Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi generasi milenial saat ini, terutama mengarahkan, melibatkan, serta mewadahi para generasi milenial dalam menciptakan perubahan yang lebih baru dan sesuai dengan perkembangan zaman (kontemporer). Generasi milenial merupakan bonus demografi sebuah negara yang dapat memberikan dampak yang lebih baik. Peningkatan penduduk usia produktif memberikan kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan peluang kerja serta menumbuhkan sektor ekonomi. Namun bonus demografi juga dapat menjadi boomerang, jika pemerintah tidak dapat memetakan generasi muda dan memaksimalkan lapangan pekerjaan.

Dampak buruk jika pemerintah tidak dapat memetakan generasi muda dan memaksimalkan generasi muda adalah semakin tingginya angka pengangguran, bahkan bisa berdampak lebih parah lagi. Terlebih tantangan pada era modern saat ini merupakan tantangan akan produktifitas. Sebenarnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan akses kemudahan untuk setiap orang mencapai sebuah keinginan. Namun, hal inilah kemudian menciptakan budaya praktis dan instan pada generasi milenial. Pada kenyataannya seringkali generasi milenial tidak mau atau bahkan tidak tertarik melakukan suatu pekerjaan yang mereka nilai sebagai profesi tradisional dan konservatif. Salah satunya ialah profesi sebagai petani, atau pengusaha tani. Semestinya hal demikian menjadi permasalahan yang harus di sadari dan diselesaikan bersama, mengingat negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi terutama disektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai negara agraris sekitar 40 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian per tahun 2022. Dari jumlah tersebut hanya 8% petani yang tergolong usia muda atau sekitar 3,2 Juta orang. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik. Sayangnya meskipun sektor pertanian merupakan bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik, akan tetapi jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Dari jumlah angkatan kerja nasional yang mencapai 144,01 Juta jiwa, jumlah angka pengangguran sekitar 8,4 Juta jiwa. Artinya masalah pengangguran menjadi masalah di Indonesia. Dilansir pada Databoks (<https://databoks.katadata.co.id/>). Dari keterangan diatas, bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani. Dengan sektor pertanian yang masih menjadi lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja domestik paling banyak. Akan tetapi, masalah pengangguran bukan sekedar urusan lapangan pekerjaan, terdapat beberapa faktor penyebab lainnya seperti minat dan motivasi juga, sangat menentukan generasi milenial atau bahkan para angkatan kerja secara keseluruhan dalam menentukan pekerjaan yang mereka jalani. Sehingga seperti apa yang dibahas sebelumnya bahwa peran pemerintah dalam memproduksi kebijakan dalam negara Indonesia perlu diselaraskan kepada potensi dan memiliki oleh Indonesia, dalam hal ini adalah potensi pertanian dan potensi bonus demografi.

Adanya *Program Youth Entrepreneurship And Employment Support Service* (Yess) adalah bertujuan untuk melahirkan wirausaha milenial dari sektor pertanian. Kemampuan mengakses pasar, permodalan hingga kualitas SDM sering menjadi penghambat berkembangnya usaha kalangan pemuda. Untuk itu melalui Hibah Kompetitif sasaran Program Yess adalah kaum muda di perdesaan dari keluarga kurang mampu, serta kaum muda yang beresiko besar terhadap kemiskinan. Target yang akan dicapai selama 6 tahun program ini adalah 320.000 generasi muda di perdesaan yang

berfokus terhadap bidang pertanian, terutama dalam membangun bisnis wirausaha pertanian.

Menurut Kementan RI indikator utama dalam *Program Youth Entrepreneurship And Employment Support Service* (Yess). Pertama, 32.500 orang memperoleh pekerjaan di sektor berbasis pertanian. Kedua, 33.500 orang pedesaan meningkat pendapatannya. Ketiga, 50.600 orang mengembangkan usaha dibidang pertanian. Keempat, 100.000 orang mampu menggunakan jasa keuangan, 4.300 diantaranya rumah tangga migran muda. Kelima, 120.000 pemuda memperoleh pendidikan keuangan. Indikator tersebut akan dicapai melalui empat kegiatan utama. Pertama, *Rural youth transition to work* (peningkatan kapasitas pemuda pedesaan di bidang pertanian). Kedua, *Rural Youth Entrepreneurship* (Pengembangan Wirausahawan Muda Pedesaan). Ketiga, *Investing to Rural Youth* (Fasilitasi akses permodalan). Keempat, *Enabling Environment fo Rural Youth* (membangun lingkungan usaha yang kondusif). Maka dengan hal tersebut akan megurangi pemuda untuk melakukan urban ke kota. Artinya dalam implementasi program Yess memiliki 4 (empat) capaian yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM petani milenial, pengembangan usaha, per mudahan akses permodalan serta terbangunnya lingkungan usaha yang kondusif. Dengan keempat capaian yang telah diupayakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Yess telah dilaksanakan. Akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai implementasi program yang efektif, perlu dilakukan penelitian untuk memastikan efektivitas adanya program tersebut.

Maka dari itu untuk mensukseskan tujuan daripada program Yess, dalam program Yess terdapat program bantuan pemodal an yang di sebut dengan hibah kompetitif. Hibah kompetitif merupakan bagian dari program Yess yang bertujuan untuk memberikan peluang dan menjaring petani muda yang siap mengembangkan usahanya. Terdapat total hibah kompetitif senilai 30 milyar, yang diberikan berdasarkan kriteria pemula, berkembang, maupun maju. Sebesar 5 sampai 10 juta untuk pemula, 25 juta untuk berkembang, dan 50 juta untuk maju. Tergantung kemampuan peserta hibah kompetitif dalam pemaparan anggaran yang tertuang dalam proposal. Hibah kompetitif dapat menjadi salah satu barometer atau indikator dalam menilai efektivitas implementasi program Yess. Sebab hibah kompetitif merupakan sub program Yess yang memfasilitasi petani milenial yang telah memenuhi syarat dan ketentuan maupun kriteria, dalam mendapatkan akses permodalan. Sehingga dalam hal ini hibah kompetitif dapat dijadikan salah satu barometer untuk menguji efektivitas implementasi dari kebijakan atau program. Dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia hanya terdapat 4 Provinsi lokasi Program Yess (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan selatan, dan Sulawesi Selatan) di 15 Kabupaten. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang juga berkesempatan melaksanakan program Yess sejak 2019 lalu, dikarenakan potensi pertaniannya

Menurut Mardijansyah selaku Koordinator program Yess Kabupaten Pasuruan pada bulan september tahun 2021 mengatakan sebanyak 1050 petani milenial telah mendapatkan pelatihan di Program Yess, dan sebanyak 22 petani yang telah memenuhi kualifikasi akan mendapatkan hibah sekitar 60-80 juta, yang seluruhnya tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut menandakan bahwa program Yess di Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan sangat baik mulai dari peningkatan kapasitas pemuda pedesaan, pengembangan wirausaha muda, hingga fasilitas akses permodalan. Meskipun pelaksanaan program Yess di Kabupaten Pasuruan berjalan dengan baik. Namun, beberapa permasalahan masih ditemukan, seperti ketidak sesuaian informasi

terutama informasi terkait penerima hibah kompetitif, yang semula dari 22 petani muda berubah menjadi 17 petani. Ketidaksesuaian informasi dapat terjadi dikarenakan laporan yang diterima Koordinator bisa jadi tidak valid atau tidak sesuai dengan dilapangan. Diketahui di Kabupaten Pasuruan pelaksana program Yess adalah DIT (*District Implementation Team*) dan bertanggung jawab kepada Koordinator. Hubungan semacam ini merupakan kondisi *principal-agent*, yang berarti Koordinator merupakan *principal* yang memberikan tugas dan wewenang kepada agen yakni DIT (*District Implementation Team*) sebagai pihak pelaksana dalam mewujudkan kesuksesan dari kebijakan yang disusun.

Sebagai implementor kebijakan maka DIT (*District Implementation Team*) Kabupaten Pasuruan seharusnya dapat memberikan informasi yang simetris kepada Koordinator mengenai implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut merupakan PR yang harus diperbaiki oleh Koordinator Yess dan DIT (*District Implementation Team*) selaku implementor program Yess di Kabupaten Pasuruan. Sehingga dalam pelaksanaan program Yess masalah keagenan harus diperhatikan. Sebab, dalam pola hubungan *principal* dan agen, asimetris informasi sangat mungkin terjadi sebab terdapat alasan yang kuat untuk menyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Salah satu masalah keagenan yang paling mendasar adalah asimetris informasi, yaitu kondisi dimana agen dapat memiliki informasi lebih banyak daripada *principal*. Adanya ketimpangan antara informasi yang didapat oleh *principal* dan *agent*, dapat menguntungkan pihak agen. Sehingga dari adanya ketimpangan informasi tersebut akan dapat diperparah, yang berdampak pada resiko *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*. Yang maksud *Adverse Selection* adalah dimana pihak agen mengetahui informasi yang tidak diketahui *principal* dan memilih untuk tidak memberitahukannya. Sedangkan *moral hazard* merupakan kondisi dimana agen sengaja melakukan segala tindakan yang menguntungkan bagi dirinya, dengan cara apapun, tanpa mempedulikan kerugian pada oranglain.

Maka dari penjelasan diatas dapat memberikan kesimpulan sementara bahwa pada implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan terdapat kondisi *principal-agent* yang sangat berpengaruh terhadap afektivitas implementasi program tersebut. Kondisi *principal-agent* yang efektif tercapai ketika pihak *principal* dan pihak *agent* menjalankan prinsip manajemen yang baik. Sehingga terjadi proses pertukaran informasi yang simetris di dalam organisasi. Informasi yang simetris adalah bentuk transparansi informasi dari *agent* kepada *principal* dalam proses implementasi kebijakan publik. Hanya saja, Jika *agent* harus melakukan tugasnya dalam pengaturan waktu kontinu, penting untuk menunjukkan bahwa fakta (data yang disajikan) yang diberikan *Agent* dapat mencerminkan dari sebuah realitas dilapangan. Dengan kata lain, implementasi program Yess dapat dikatakan efektif apabila dalam implementasinya, masalah keagenan dapat dimanajemen dengan baik.

## **KAJIAN TEORI**

### **Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip (Lucia Maduningtias, 2022) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya juaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut (Prihartono, Theresia, &

Mayangsari, 2019), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Katz dan Kahn dalam (Jumroh, 2021) mendefinisikan efektivitas sebagai usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara, di sini ada dua faktor yang dianggap paling penting dalam penentuan efektivitas. Pertama konsep efisiensi, yakni sebagai perbandingan antara masukan, keluaran, energi, dan mengajukan argumentasi bahasa penyelesaian atau pemecahan ekonomis dan teknis dalam masalah organisasi. Kedua efektivitas politis, yakni sebagai usahausaha jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan untuk organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan baik dengan para anggota organisasi atau dengan pihak luar organisasi.

### ***New Publik Manajemen***

*New Public Management* (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management (Denhardt & Denhardt, 2015) *New Public Management* (NPM) dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. *New Public Management* (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. *New public management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. (Mardiasmo, 2002)

Menurut (Aminullah, 2020) menjelaskan secara umum ciri-ciri *New Public Management* (NPM) sebagai berikut:

- a) Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas
- b) Pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas
- c) Pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional dalam pemberian order dan anggaran umum
- d) Pelaksana order swasta dan pemerintah diperlakukan sama.

### ***Principal Agent***

Menurut (Maskar, 2022) *Principal agent* atau *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan keagenan (*agency relationship*) dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Menurut Jensen dan Meckling dalam (Adam, 2018) *Agency relationship* merupakan sebuah ikatan kerja dimana satu orang atau lebih sebagai pemegang saham (*principal*) menunjuk pihak lain (*agent*) untuk memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan atas nama principal. Principal adalah pemegang saham yang mana menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan agen adalah pengelola perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh para pemegang saham kepadanya. Prinsip utama dari teori keagenan

adalah adanya suatu kontrak dimana satu atau lebih principal (pemilik) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan agen. (Yeniatie & Destriana, 2010). (Yasin, Putra, & Danar, 2021) mengungkapkan bahwa yang dimaksud sebagai teori principal agent adalah bagaimana untuk mengorganisasikan hubungan dengan maksimal, dimana satu pihak (*principal*) memiliki pekerjaan, dimana hal tersebut dilaksanakan oleh pihak lainnya (*agent*). Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan keadaan dimana terdapat prinsipal dan agent. Keadaan semacam ini tentu dapat menimbulkan resiko masalah keagenan. Adapun masalah keagenan yaitu: Asimmetryc Information, Adverse Selection, dan Moral hazard.

*Asymmetric Information* : Dalam teori Principal Agent, *Asymmetric Information* atau Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana pihak manajemen dalam hal ini agent lebih banyak mengetahui kondisi desa dibandingkan principal. Asimetri informasi dapat dijadikan alat bagi agent dalam mencapai kepentingan diri sendiri atau memaksimalkan kepentingan pribadi salah satu pihak. Agen sebagai yang bertindak di lapangan mempunyai lebih banyak informasi daripada principal, oleh sebab itu Agent melalui asimetris informasi akan memberikan peluang bagi agen untuk melakukan tindakan penyelewengan demi mencapai kepentingan pribadi. Asimetri informasi adalah cikal bakal yang akan menimbulkan *moral hazard* dan *adverse selection*.(Aminullah, 2020)

- *Adverse Selection* : Adverse Selection atau seleksi yang merugikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manager (agent) yang tidak seluruhnya diketahui oleh pincipal atau pemegang saham maupun pemberi pinjaman (Scott,2000). Menurut pendapat (Lane, 2007) Adverse Selection dan Moral Hazard dapat dijadikan permainan di dalam institusi politik, yang berarti pengungkapan informasi tentang sifat tersembunyi dari agen serta tindakan tersembunyi mereka. Institusi politik dapat mengundang beberapa agen untuk memeriksa agen lain, atau mengizinkan agen tertentu untuk membatalkan keputusan agen lain. Menurut (Gilardi, 2014) Seleksi yang merugikan atau pilihan yang salah (atau *ex-ante oportunisme*, atau informasi yang tersembunyi) terjadi ketika prinsipal tidak bisa yakin bahwa dia adalah pemilih agen yang memiliki keterampilan yang paling tepat atau preferensi dan *moral hazard* (atau *ex-post oportunisme*, atau tindakan tersembunyi) terjadi setiap kali tindakan agen tidak dapat dipantau secara maksimal oleh prinsipal.
- *Moral Hazard* : Menurut Muhammad, 2005 dalam (Fauziah & Syakdiyyah, 2011) ia menjelaskan bahwa moral hazard merupakan suatu kondisi yang berpotensi menyebabkan hal buruk berupa kerugian atau kerusakan dalam hubungan antara principal dan agent. Moral hazard yaitu bahwa keadaan dimana manajer atau orang dalam lainnya mengetahui informasi lebih banyak mengenai informasi dan prospek organisasi/perusahaan daripada investor pihak luar (Scott, 2000). Dengan keuntungan tersebut agent dapat melakukan tindakan yang negative, yang tidak diketahui pihak luar/investor, sehingga kemudian berdampak pada penyimpangan atau kesewenang-wenangan sebab merasa tidak diawasi oleh principal. *Moral hazard* juga dapat diartikan dengan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain untuk terciptanya kontrak kerja sama. Menurut (Eisenhardt, 1989) dalam (Maysi, 2022), teori agensi mengasumsikan tiga sifat manusia yakni: 1) Manusia pada dasarnya selalu mementingkan kepentingan diri sendiri (*self interest*). 2) Daya pikir manusia

sangat terbatas mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang (*bounded rationality*). 3) Manusia cenderung memiliki sifat menghindari resiko yang akan terjadi (*risk adverse*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yang berusaha menjelaskan gambaran mengenai objek berdasarkan fakta dari kejadian yang di teliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang objektif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan dalam rangka mendukung data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dipilah dan disederhanakan, agar memberi kemudahan dalam penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara (Kadji, 2016). Teknik analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles & Huberman (1992) dalam (Kadji, 2016). Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded* (membumi).

## HASIL PENELITIAN

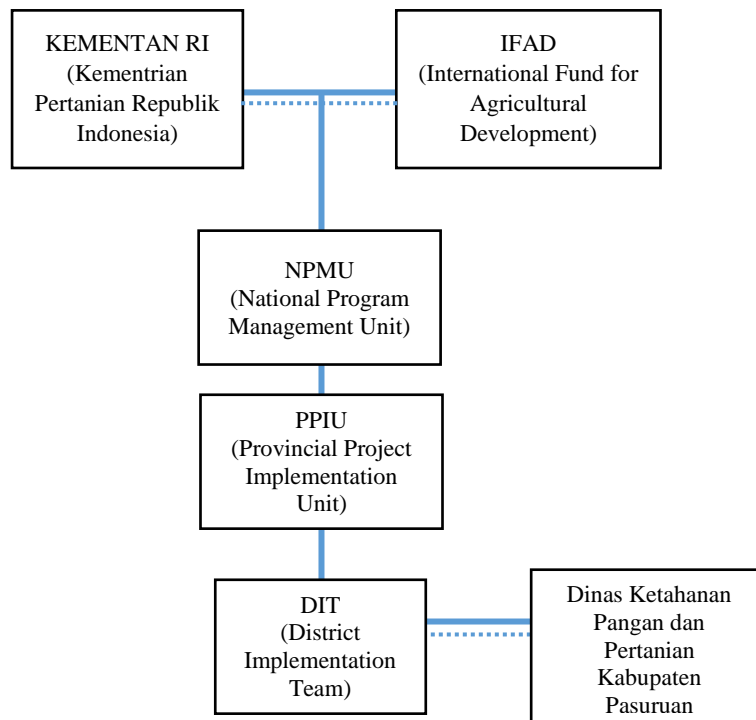
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Diketahui pemilihan lokasi program Yess, dilakukan berdasarkan potensi pertanian wilayah tersebut. Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan program Yess dikarenakan potensi pertaniannya. Berikut tabel potensi pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan:

**Tabel 1.**  
**Potensi Pertanian Kabupaten Pasuruan**

No	Sentra Komoditi	Kecamatan
1	Padi, Jagung	Padi di 20 Kecamatan (Kecuali Tosari, Puspo, Tuter dan Lumbang) Jagung tersebar hampir di 24 Kecamatan
2	Mangga	Rembang & Sukorejo
3	Apel, Paprika, Krisan	Tuter
4	Durian	Pasrepan, Lumbang, Puspo, Tuter, Purwodadi, Purwosari, Prigen
5	Kopi	Pasrepan, Lumbang, Puspo, Tosari, Tuter, Purwodadi, Purwosari, Prigen
6	Kentang	Tosari, Tuter
7	Sedap Malam	Bangil, Rembang

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan

Tabel diatas menunjukkan wilayah Kabupaten Pasuruan sangat memiliki potensi terutama dibidang pertanian. Sehingga para masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani Kabupaten Pasuruan, diuntungkan dengan adanya program Yess yang dapat mendorong kemajuan pada sektor pertanian. Selanjutnya dalam program ini sasaran program disebut PM (Penerima Manfaat) dan CPM (Calon Penerima Manfaat). PM merupakan sejumlah orang atau individu yang telah menerima manfaat program yess/hibah kompetitif, sedangkan CPM merupakan sejumlah orang atau individu yang belum menerima hibah kompetitif.



**Gambar 1.** Struktural Program Yess Kabupaten Pasuruan  
Sumber: DIT Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa gambar diatas merupakan struktural program Yess Kabupaten Pasuruan terdiri dari Kementan RI sebagai pencetus kebijakan dengan kerjasama bersama IFAD. Kemudian pelaksana program terdiri dari NPMU, PPIU, DIT yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan. Adapun dalam pelaksanaannya DIT bertanggungjawab kepada Koordinator dalam hal ini adalah Bapak Mardijansah.

**Penerima Manfaat Program Yess di Kabupaten Pasuruan**

Dalam implementasinya program Yess di Kabupaten Pasuruan memiliki tiga kegiatan utama yakni pelatihan, magang, serta hibah kompetitif. Namun pada prinsipnya kategori penerima manfaat adalah kelompok atau individu yang telah menerima hibah kompetitif. Menurut studi dokumentasi dilapangan oleh peneliti terdapat 17 orang penerima manfaat per tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 terdapat 125 Calon penerima manfaat yang masih dalam status proses. Berikut data penerima manfaat di Kabupaten Pasuruan.

**Tabel 2.**  
**Data Penerima Hibah Kompetitif 2021**

No	Nama	Kecamatan	Komoditas
		Gondang	
1	Lukman Hakim	Wetan	Budidaya Melon
2	Muhammad Syihabudin	Kejayan	Budidaya Jamur
3	Salimah	Lekok	Olahan Tahu
4	Machrus Afandi	Pandaan	Budidaya dan Olahan Jamur
5	Kusairi	Prigen	Budidaya dan Okahan Kopi



6	Efendi Mulyo Selamat	Purwodadi	Budidaya Sapi Perah
7	Edi Santoso	Purwodadi	Beber Petelur
9	Munif	Puspo	Budidaya Sapi Perah
10	Shinta Shofiatul Khunia	Rembang	Sedap Malam
11	Nur Kholila	Rembang	Budidaya dan Olahan Mangga
12	Hari Prasetyo	Sukorejo	Hidroponik
13	Muhammad Priyono	Tosari	Budidaya Kentang
14	Ghosiyatul	Tutur	Budidaya Paprika
15	Ahmad Hofit	Tutur	Budidaya Sapi Perah
16	Rifatul Muzzayanah	Tutur	Olahan Talas,Frizen dan Durian
17	Nur Budiantoko	Wonorejo	Pembibitan Sapi

Sumber: DIT Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerima manfaat program yess di tahun 2019 terdapat 17 orang yang terbagi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dari keseluruhan data penerima manfaat mereka merupakan kelompok yang lolos dalam seleksi hibah kompetitif dan telah memenuhi persyaratan serta mengirim proposal hingga disetujui. Terdapat 3 tahapan dalam hibah kompetitif yakni:

- 1) Pendaftaran,
- 2) Seleksi,
- 3) Pendanaan serta Monitoring Evaluasi.

### **Asymmetric Information dalam Implementasi Program Yess**

Asymmetric Information yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Asymmetric information terjadi jika satu atau lebih pihak mempunyai informasi yang lebih baik mengenai kualitas suatu produk atau jasa yang dipertukarkan dibandingkan pihak lain, sehingga tidak terjadi proses komunikasi dan pertukaran informasi yang seimbang antara para pelaku kemitraan. Asymmetric information bukan berarti tidak dimilikinya informasi, tetapi terkadang informasi tersebut tidak dapat diperoleh dan berbiaya tinggi sampai dengan pertukaran terjadi, atau terkadang diperoleh namun sudah sangat terlambat. Munculnya asymmetric information dan adanya kepentingan pribadi yang tidak selalu sama antara Prinsipal dan Agen, mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh Agen. Asimetris informasi dapat menyebabkan terjadinya Adverse Selection (seleksi yang merugikan) serta Moral Hazard (rusaknya moral). Salah satu bentuk moral hazard adalah munculnya perilaku oportunistis dari salah satu pihak yang melakukan pertukaran. Dengan pemaparan Asimetri Informasi diatas berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Bahwa asimetri informasi dimungkinkan terjadi saat pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan DIT pada posisi interaksi langsung dengan sasaran program.

Asimetris informasi yang terjadi pada implementasi program Yess adalah Koordinator tidak mengetahui kondisi serta permasalahan yang terdapat dilapangan. Namun tim Mobilizer mengakui bahwa kondisi tersebut hanya pada situasi tertentu dan tidak berpengaruh terhadap implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan. Dari hasil temuan dilapangan pada implementasi program Yess terdapat evaluasi berkala yang dilakukan Koordinator terhadap DIT. Melalui hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Peneliti melihat adanya tim

mobilizer yang sedang melakukan pelaporan mengenai program Yess di Kabupaten Pasuruan kepada Bapak Mardijansah selaku Koordinator program Yess. Sedangkan pada prinsipnya Tim DIT memiliki kantor kerja yang letaknya cukup jauh dari lokasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Hal ini secara tidak langsung memberikan informasi bahwa asimetris informasi dapat terjadi pada pelaksanaan program yess, namun dapat teratasi dengan baik.

### **Adverse Selection dalam Implementasi Program Yess**

Seleksi dalam hubungan prinsipal dan agen merupakan tahapan awal yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan keberlanjutan kontrak yang akan disepakati bersama. Seleksi sangat menentukan keberhasilan Prinsipal dalam mencapai tujuan atau kepentingannya. Namun dalam praktiknya, seringkali Prinsipal melakukan kesalahan dalam memilih Agen yang sesuai untuk diberi kewenangan mengelola sumberdaya (*adverse selection*). (Petrie, 2002) mengartikan salah pilih sebagai kesalahan Prinsipal dalam mengidentifikasi keahlian Agen dan ketidakmampuan Prinsipal dalam memverifikasi secara lengkap kemampuan Agen sebelum mengambil keputusan untuk memberikan kewenangannya kepada Agen. Dalam kaitannya dengan *adverse selection* dalam proses implementasi program Yess, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya dalam proses seleksi yang dilakukan oleh DIT masih tidak dapat memastikan komitmen para calon penerima manfaat, asal meloloskan CPM sebenarnya sangat berdampak pada pelaksanaan program Yess itu sendiri. Meskipun dengan seleksi tersebut menurut persepsi DIT itu sudah sesuai, akan tetapi adanya dua orang penerima manfaat yang menyalahgunakan hibah menggambarkan bahwa orang yang terpilih sebagai penerima hibah tidak komitmen, dengan hal ini membuktikan bahwa *adverse selection* terjadi sebab ketidak mampuan DIT dalam melakukan seleksi di Kabupaten Pasuruan.

### **Moral Hazard dalam Implementasi Program Yess di Kabupaten Pasuruan**

Dalam suatu hubungan keagenan, pricipal dan agen akan berupaya memaksimumkan utilitasnya dengan asas saling menguntungkan. Namun karena pada umumnya penjual lebih memiliki informasi ketimbang pembeli. Dalam hal ini penjual adalah agen, menguasai informasi yang lebih baik, sehingga terdapat resiko atau kemungkinan perilaku oportunistik salah satu pihak untuk tidak selalu bertindak guna kepentingan pihak lain. Situasi ini menimbulkan munculnya insentif (godaan) bagi satu atau lebih pelaku (khususnya agen) untuk berperilaku menyimpang dalam rangka memaksimumkan kesejahteraan dan utilitasnya sendiri. Berkaitan dengan *moral hazard* pada implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan, tidak ditemukan pada tahap seleksi hibah kompetitif program Yess. Namun *moral hazard* sangat mungkin terjadi pada pelaksanaan program Yess. Hal tersebut apabila DIT dengan sengaja melakukan keberpihakan terhadap salah satu CPM. Dengan cara memberikan kemudahan verifikasi terhadap proposal yang dikehendaki dan sebaliknya, tidak memberikan verifikasi terhadap proposal yang tidak dikehendaki.

### **PEMBAHASAN**

Mengacu pada seluruh penjelasan hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa pada kenyataannya Kementrian Pertanian bersama IFAD hanya melakukan kerjasama atas konsep yang telah disepakati. Selanjutnya dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pasuruan terdapat DIT yang menjadi pelaksana tugas sebagai implementor program tersebut. Sebagai pelaksana program Yess, maka DIT harus melaporkan segala

bentuk kegiatan program Yess kepada Koordinator Program Yess di Kabupaten Pasuruan. Menurut Jensen & Meckling dalam (Aminullah, 2020). Hal tersebut merupakan hubungan keagenan karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sesuai dengan perjanjian tersebut dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan kepada agen. Dalam keadaan tersebut memunculkan masalah keagenan yang dapat mengganggu proses implementasi program Yess.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari ketiga masalah keagenan yaitu, Asimetris informasi, *adverse selection*, dan *moral hazard*. Pada pelaksanaan program Yess di Kabupaten Pasuruan ketiga masalah keagenan tersebut sangat mungkin terjadi. Akan tetapi pada pelaksanaan program Yess di Kabupaten Pasuruan oleh DIT, peneliti hanya menemukan dua permasalahan yakni asimetris informasi dan *adverse selection*. Asimetris informasi dalam yang berkaitan dengan implementasi program yess di kabupaten pasuruan kerap terjadi dikarenakan kurangnya profesionalitas DIT dalam menyikapi permasalahan dilapangan. Meskipun tindakan tersebut dinilai tidak berpengaruh terhadap proses implementasi program yess. Akan tetapi ketidakmauan untuk melaporkan permasalahan kepada koordinator berdampak pada kurangnya tanggung jawab program Yess terhadap keluhan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut Koordinator program Yess mengadakan evaluasi berkala agar tidak timbul asimetris informasi pada pelaksanaan program Yess. Selanjutnya berkenaan dengan *Adverse Selection* atau seleksi yang merugikan. Pada implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan terjadi akibat ketidakmampuan DIT dalam melakukan seleksi terhadap CPM. Serta kurangnya memahami mengenai juknis hibah kompetitif. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa penyalahgunaan hibah oleh PM merupakan dampak dari ketidakmampuan DIT dalam menganalisis mutasi rekening CPM. Sebab salah satu persyaratan penerima hibah adalah CPM harus memiliki rekening usaha yang berbeda dengan rekening keluarga yang notabene digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumsi). Dengan adanya persyaratan tersebut menjadi salah satu langkah *preventif* yang tidak boleh diabaikan.

## SIMPULAN

Bahwa implementasi program Yess dalam perspektif *principal agent* di Kabupaten Pasuruan secara garis besar telah berjalan cukup efektif. Meskipun memiliki beberapa catatan dalam pelaksanaannya. Program Yess di Kabupaten Pasuruan telah memberikan dampak baik terhadap petani muda di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan tidak adanya permasalahan keagenan yang bersifat fatal. Hubungan komunikasi antar DIT dan Koordinator dalam melaksanakan program Yess di Kabupaten Pasuruan menurut peneliti telah berjalan cukup baik dan bersedia berbenah. Sehingga dengan adanya penekanan terhadap masalah keagenan (*asimmetryc information, adverse selection, dan moral hazard*) dapat mengurangi gesekan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A.-K. 2018. The Importance of Public Administration Towards Achieving Good Governance for Positive National Development by Using SmartPLS 3. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 5(2): 68–97.
- Aminullah. 2020. *Principal-agent dalam implementasi kebijakan dana desa di desa linggo kecamatan kejayan*. Malang: UB Press.

- <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1847980419895741>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. 2015. The New Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5): 664–672. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.12347>
- Fauziah, N., & Syakdiyyah, N. 2011. Pengaruh Informasi Asimetrik Terhadap Masalah Agency Kontraktual Dalam Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 11(9): 1341. <https://journal.uui.ac.id/JABIS/article/view/7546>
- Gilardi, F. 2014. Methods for the Analysis of Policy Interdependence. *Comparative Policy Studies*: 185–204. [https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137314154\\_9](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137314154_9)
- Jumroh, M. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*, 81–150. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/66>
- Lane, J. E. 2007. Comparative Politics: The principal-agent perspective. *Comparative Politics: the principal-agent perspective*. <https://doi.org/10.4324/9780203935545>.
- Lucia Maduningtias. 2022. Manajemen Integrasi Kurikulum Pesantren Dan Nasional Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Pesantren. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4): 323–331. [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/378](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/378)
- Mardiasmo, M. 2002. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Unisia*, 25(46): 299–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2337>
- Maskar, S. 2022. Implementasi Persamaan Non Linear Pada Matematika Bisnis. *Implementasi Persamaan Non Linier Dalam Matematika Bisnis*, 2(3): 1–13. <http://duniailmu.org/index.php/repo/article/view/88>
- Maysi, S. 2022. *Pengaruh Asimetri Informasi , Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2020*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/9014>
- Petrie, M. 2002. A Framework for Public Sector Performance Contracting. *OECD Journal on Budgeting*, 1(3): 117–153. [https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-framework-for-public-sector-performance-contracting\\_budget-v1-art18-en](https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-framework-for-public-sector-performance-contracting_budget-v1-art18-en)
- Prihartono, P., Theresia, T., & Mayangsari, S. 2019. Pengaruh Integritas, Objektivitas, Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Efektivitas Audit Internal Dengan Gaya Kepemimpinan Demokrasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(1): 63–88. <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/5077>
- Yasin, Y., Putra, F., & Danar, O. R. 2021. Manajemen barang milik daerah berbasis kemitraan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2): 147–155. <https://www.enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/1281>
- Yeniatie, & Destriana, N. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(1): 1–16. <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/247>